

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMALSUAN
SERTIFIKAT TANAH BERDASARKAN KODE ETIK PROFESI
NOTARIS DAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

ABDUR ROHMAN

NPM.

18100003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

2022



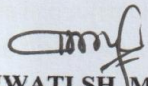
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

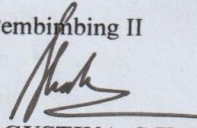
Nama : Abdur Rohman
NPM : 18100003
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH
BERDASARKAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS
DAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS
PERUBAHAN UU NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

Menyetujui,

Pembimbing I


ERNIWATI,SH.,M.HUM

Pembimbing II


H. SAKINAH AGUSTINA, S.H.,M.HUM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


ERNIWATI, S.H.,M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur rohman

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 februari 1999

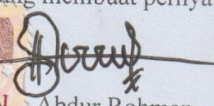
NPM : 18.10000.3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaraan dalam pernyataan ini tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 22, juni 2022
Yang membuat pernyataan


Abdur Rohman
18.10000.3

ABSTRAK

Sertipikat hak atas tanah pada umumnya merupakan suatu surat bukti yang menegaskan bahwa pemegang telah mendaftarkan tanahnya. Melihat fungsi sertifikat sebagai alat bukti yang kuat hendaknya Notaris dalam membuatnya harus benar-benar memperhatikan keabsahananya karena apabila terjadi pelanggaran dalam pembuatan sertifikat tersebut berarti Notari tersebut telah melanggar kode etikanya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut akan dikenakan sanksi hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun permasalahan dalam skripsi adalah Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap sertifikat yang dibuatnya dan bagaimana bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen sertifikat tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan penelitian melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris

Dari penulisan ini disimpulkan Simpulan , adapun sanksi yang dikenakan kepada Notaris dapat dilihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dikenakan sanksi administrasi, yang berupa , teguran lisan, teguran tertulis; pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat

Kata Kunci : Notaris, Sertifikat,Sanksi Hukum

ABSTRACT

A land title certificate is generally a letter of evidence confirming that the holder has registered his land. Seeing the function of the certificate as a strong evidence, the Notary in making it must really pay attention to its validity because if there is a violation in making the certificate, it means that the Notary has violated his code of ethics. The violation committed by the Notary will be subject to legal sanctions based on Law Number 2 of 2014 on the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.

The problem in the thesis is how is the responsibility of the Notary towards the certificate he makes and what is the form of sanctions that can be applied to a Notary who falsifies land certificate documents according to Law Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions

The research method in this thesis is carried out by collecting data, the author will conduct research through two approaches, namely the normative juridical approach and the empirical juridical approach.

From this writing, it can be concluded that the sanctions imposed on Notaries can be seen in Article 85 of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, namely administrative sanctions, in the form of verbal warnings, written warnings; temporary dismissal, honorable discharge and dishonorable discharge

Keywords : Notary, Certificate, Legal Sanctions